

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Nur. 2018. *Hukum Kehutanan*. Jakarta: Guepedia.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Qurtubi. 2019. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Anwar. et al. 2021. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara, Aceh*: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Anwar Sodik. 2021. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*. Kendal: Ahsyara Media Indonesia.
- Azmi Fendri. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dadang. 2021. *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Erwin. et.al. 2024. *Sistem Informasi Manajemen (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Fajlurahhman Jurdi. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media.
- Firman Yudhanegara. et.al. 2023. *Pengantar Fisafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistomologi, dan Asiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Herman Budi Sasono, Ahmad Gamal. 2022. *Manajemen Penebangan Hutan*. Yogyakarta: ANDI.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ipong Dekawati. 2022. *Manajemen Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Irfan Setiawan dan Ayu Widowati Johannes. 2024. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: Rtujuh Media Printing.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi Cetakan V)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iyung Pahan. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Huluh hingga Hilir*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Lukas R Wibowo. et.al. 2019. *Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan*. Bogor: CIFOR.
- Maruli Pardamean. 2011. *Sukses membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*. Depok: Penebar Swadaya.

- Maruli Pardamean. 2017. *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Monica Feronica Bormasa. 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Noor Syaid. 2020. *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*. Alprin.
- Rasio Ridho Sani. 2022. *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Dirjen Gakum KLHK.
- Rika Harini. 2020. *Valuasi Ekonomi di Kawasan Geopark: Sebuah Kajian untuk Mitigasi Bencana Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rindyah Hanafi. 2021. *Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Robert Siburian dan Masyhur Imron. 2020. *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, dan Aksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rustam Effendi Lubis dan Agus Widanarko. 2011. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka.
- Salim H.S. 1995. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarko. 2014. *Budi Daya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan*. Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka.

Usep Wahyu. 2022. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.

Victorianus Randa Puang. 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish.

Yahya A. Zein. 2021. *Problematika Hukum Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadammedia Group.

Skripsi

Andi Fildah Ramadani. 2017. *Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Liza Amalia. 2023. *Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Jurnal

Adri Ahmadi dan Arief Rahman. 2023. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Hutan sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan*

untuk Lahan Pertanian (Studi Desa Selante Kec. Plampang Kab. Sumbawa). Jurnal Private Law. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Ahmad Maryudi. 2016. *Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengeolaan Hutan (KPH) di Indonesia.* Jurnal Ilmu Kehutanan. Volume 10 Nomor 1. Fakultas kehutanan.

Arianggy Setiadi, Munir Salham, dan Budiman. 2018. *Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli.* Jurnal Kolaboratif Sains. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu.

Atang Hermawan Usman. 2015. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia.* Jurnal Wawasan Hukum. Volume 30 Nomor 1. Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Gunggung Senoaji, Muhammad F. Hidayat, Iskandar. 2019. *Konflik Pemanfaatan lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Basadi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.* Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 17 Nomor 1. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Undip.

Hastuti, Mappaming, Abdi. 2021. *Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Unit Pelaksana Teknis KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) V Mata*

- Allo Kabupaten Enrekang*, Jurnal Unismuh. Volume 2 Nomor 1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan. 2022. *“Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muao Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19”*. Jurnal Jurisprudenta (HAM dan Ilmu Hukum). Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Purwono. 2008. *Studi Kepustakaan*. Jurnal Info Persada. Volume 6 Nomor 2. Pustakawan Utama UGM, Yogyakarta.
- Yusuf Daeng, et.al. 2024. *“Penegak Hukum Pidana Dari Berbagai Aspek Sumber Daya Manusia”*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 4 Nomor 4. Universitas Lancang Kuning.
- Zakiah, Mardianto, Zailani S. Marpaung. 2020. *Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 1. Jurusan Administrasi Publik Fisip Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Zulkarnain Hasibuan. 2016. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanoria., Volume 1 Nomor 1. Universitas Muhammadiyah Tapanuli.
- Zulkifli Aspan. 2022. *“Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup”*. Jurnal Amanna Gappa, Volume 30 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber Internet

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2023.

Renja Perubahan. Diakses pada 7 September 2024,
https://ppid.sulselprov.go.id/uploads/20240627142934_Renja_Perbahan_2023_DLHK_opt.pdf.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2023.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. diakses 28 September 2024,
https://ppid.sulselprov.go.id/uploads/20240705145837_RENSTRADLHK_2024-2026_FIX_opt1.pdf.

FORCLIME. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Diakses 29 Juli 2024,

<https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20Bahasa.pdf>.

FORCLIME. 2023. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Diakses 29 Juli

2024, <https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20Bahasa.pdf>.

GAKKUM: Penegakan Hukum Lingkungan & Kehutanan. 2023. *Perkara*

Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kabupaten Luwu Timur Segera Disidangkan. Diakses pada 15 Januari 2024,
<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/684>.

GAKKUM: Penegakan Hukum Lingkungan & Kehutanan. 2023. *Terlibat*

Perambahan Hutan Oknum Kepala Desa Ditangkap Gakkum LHK.

Diakses pada 20 Agustus 2024,
<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/620>.

GreatNusa. 2021. *Pengawasan dalam Manajemen: Pengertian, Jenis, dan Fungsinya*. Diakses pada 23 Januari 2024,
<https://greatnusa.com/artikel/fungsi-pengawasan-kuantitas-dan-kualitas-dalam-manajemen/>.

Hukum Online. 2017. *Perubahan Status Tanah Perkebunan dari Hutan Produksi Terbatas Menjadi Hak Guna Usaha*. Diakses pada 03 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perubahan-status-tanah-perkebunan-dari-hutan-produksi-terbatas-menjadi-hak-guna-usaha-lt598bd73dbe4b5>.

Kabupaten Luwu Timur. 2019. *Potensi Perkebunan*. Diakses 29 Februari 2024, <http://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/potensidaerah/perkebunan>.

PPIP Luwu Timur, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur*, diakses 28 April 2024, <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id>.

Yulianta Saputra. 2021. *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*. Diakses pada 23 Januari 2023, [Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta \(uin-suka.ac.id\)](https://ilmu.hukum.uin-suka.ac.id).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 8321/UN4.5.1/TD.05/2023

FORM D

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : 1. Surat Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Tanggal 14 Desember 2023 tentang usulan Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama Tahtia Salsabillah dan NIM B021201022
2. Bahwa dosen yang tersebut namanya dibawah ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
3. Bahwa berhubung point 1 dan 2 tersebut dipandang perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 13/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
5. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2781/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 36620/UN4.1/PP.39/2017 tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2825/UN.1/KEP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode II tahun 2018-2022
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Mengangkat :
1. Sdr. Dr. Zulkifli Aspan ,S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama
2. Sdr. Ahsan Yunus ,S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping
- Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Tahtia Salsabillah, NIM B021201022
- Kedua : Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun 2023
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tersebut terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 14 Desember 2023



Lampiran :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas;
3. Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Unhas;
4. Arsip;

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian Fakultas Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

Nomor : 1999/UN4.5.1/PT.00/2024
Lamp. :
Perihal : PENELITIAN

Kepada

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
di -
Tempat,

Dengan Hormat,

Disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

N a m a : TAHTIA SALSABILLAH
No. Mahasiswa : B021201022
No. Hp. : 081935312800
Program Studi : (S1) HAN
Pembimbing Utama : Dr. ZULKIFLI AHSAN YUNUS, SH, MH

Akan Menyusun Skripsi yang merupakan bagian Kurikulum Fakultas Hukum Unhas untuk itu dimohon Mahasiswa yang bersangkutan dibantu / difasilitasi untuk mendapatkan data / informasi yang Berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Demikian surat pengantar Penelitian ini, Atas Bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 19 Juni 2024

An, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197612291999031005

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 16388/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor :
1999/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah
ini:

N a m a	: TAHTIA SALSABILLAH
Nomor Pokok	: B021201022
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan, Km 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH
HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 31 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmptsp.luwutimurkab.go.id
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 15 Agustus 2024

Kepada
Yth Kepala Dinas Kehutanan

Nomor : 500.16.7.2/223/PEN/DPMPTSP-LT/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 15 Agustus 2024 Nomor : 223/KesbangPol/VIII/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **TAHTIA SALSABILLAH**
Alamat : Desa Lera, Kec. Wotu, Kab. LUwu
Tempat / Tgl Lahir : Luwu Timur / 02 Desember 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 081935312800
Nomor Induk Mahasiswa : B021201022
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN
PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : 12 Agustus 2024 s.d. 12 September 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP**



Andi Habil Unru, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr (i) TAHTIA SALSABILLAH di Tempat;
4. Dekan UNIVERSITAS HASANUDDIN di Tempat.

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi (Seksi Wilayah 1 Makassar)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
Jalan Batara Bira No. 9, Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya-Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telp: 08114411441 Email : bphhksulawesi.gakkum@menlhk.go.id Kode Pos 90243

SURAT KETERANGAN

NOMOR: S.Ket.197/BPPHLHK.3/GKM.4.11/B/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Waqqas, S.Sos
NIP : 19741227 200003 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama, NIP : Tahtia Salsabillah
Nomor Pokok : B021201022
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Benar telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR" dari tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2024

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 01 Agustus 2024

An. Kepala Balai

Kepala Seksi Wilayah I Makassar



ABDUL WAQQAS, S.Sos

NIP. 19741227 200003 1 002

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UPTD KPH Angkona



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ANGKONA**

Jln. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur,
email : kphangkona@gmail.com Kode Pos 92981

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/54/KPH-AK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramli, SE
NIP : 197001052007011005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala UPTD KPH Angkona Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama/NIP : Tahtia Salsabilah
Nomor Pokok : B021201022
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar.

Benar telah selesai mengadakan penelitian di Kantor UPTD KPH Angkona Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

'EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR' dari tanggal 12 Agustus 2024 – 12 September 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malili, 13 September 2024

Kepala UPTD KPH Angkona



Lampiran 7. Dokumentasi Saat Melakukan Penelitian

